

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesejahteraan sosial adalah keadaan tercukupinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara supaya bisa hidup layak dan sanggup mengembangkan diri, dengan dapat melaksanakan fungsi sosialnya (Undang - Undang Tentang Kesejahteraan Sosial, 2009). Faktanya, baik jumlah maupun mutu tantangan terkait kesejahteraan sosial semakin meningkat. Berdasarkan statistik BPS tersebut, masih banyak masyarakat yang kesulitan untuk mencukupi kebutuhan pokoknya karena keadaannya yang mengakibatkan berkurangnya fungsi sosial. Akibatnya, mereka sulit mengakses sistem bantuan sosial bahkan tidak bisa hidup sehat.

Fenomena kemiskinan merupakan salah satu bukti konkrit dari sebuah persoalan yang bersangkutan dengan kesejahteraan sosial. Badan Pusat Statistik memandang kemiskinan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran, melainkan berupa ketidakmampuan dari segi ekonomi guna memenuhi kebutuhan dasar makanan. Seseorang yang dikategorikan miskin yaitu jika orang yang bersangkutan memiliki rata – rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis Kemiskinan (GK) terbagi atas dua jenis yaitu Garis Kemiskinan Makanan dan Garis Kemiskinan Non-Makanan. Garis Kemiskinan mempresentasikan nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang

guna mencukupi kebutuhan pokoknya selama sebulan, mencakup kebutuhan makanan ataupun non-makanan (Badan Pusat Statistik , 2022).

Berdasarkan data yang dikutip dari website resmi BPS tahun 2022, terdapat data yang menunjukkan bahwa total penduduk miskin di Indonesia pada bulan Maret 2022 yaitu 26,16 jt orang. Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya penurunan terhadap bulan September 2021 yang menurun sebanyak 0,34 jt orang dan bulan Maret 2021 menurun 1,38 jt orang. Sedangkan presentase penduduk miskin pada tiga tahun terakhir khususnya di DKI Jakarta yaitu dari tahun 2019 sampai tahun 2021 mengalami kenaikan. Pada tahun 2019, penduduk miskin ada sebanyak 365,55 ribu, pada tahun 2020 bertambah menjadi 480,86 ribu dan pada tahun 2021 jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta sebanyak 501,92 ribu. Hal tersebut menunjukkan bahwa angka kemiskinan di DKI Jakarta setiap tahunnya mengalami lonjakan. Umumnya kemiskinan dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya yaitu ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Karena kompleksitas masalah kemiskinan dan keterkaitan faktor – faktor tersebut, diperlukan strategi dan kebijakan yang efektif untuk mengurangi kemiskinan secara terarah dan berkelanjutan. Maka, pemerintah Indonesia, baik pemerintah pusat maupun daerah, melakukan berbagai upaya penanggulangan kemiskinan melalui berbagai kegiatan dan program penanggulangan kemiskinan sesuai dengan sasaran pembangunan nasional (Indrawati et al., 2020).

Program penanggulangan kemiskinan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat terus diupayakan untuk menekan angka kemiskinan yang terus

mengalami lonjakan. Salah satu program yang diluncurkan oleh pemerintah guna mengatasi permasalahan tersebut yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah ada sejak tahun 2007 saat masa kepemimpinan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono sampai sekarang pada masa kepemimpinan Bapak Joko Widodo. Program Keluarga Harapan adalah salah satu program perlindungan sosial di Indonesia dalam wujud bantuan sosial dengan target sasaran yaitu keluarga miskin dan rentan miskin dengan syarat – syarat tertentu salah satunya yaitu mereka harus terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Program Keluarga Harapan merupakan salah satu upaya dari pemerintah yang bertujuan guna mengentaskan kasus kemiskinan antargenerasi, untuk menanggulangi kemiskinan secara cepat serta ditujukan kepada yang mencakup penerima manfaat PKH terutama masyarakat lanjut usia dan penyandang disabilitas dengan tujuan yaitu menjaga kesejahteraan sosial mereka sebagaimana amanat konstitusi dan Nawacita Presiden Republik Indonesia (Kementerian Sosial, 2021).

Segala upaya terus dilakukan oleh pemerintah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya salah satunya yaitu melalui PKH. Sebab, dapat dilihat dari sasaran PKH yaitu berfokus pada kesehatan dan pendidikan masyarakat. Hal ini seperti yang terdapat dalam buku yang diterbitkan oleh BPS, ada delapan indikator untuk mengukur kesejahteraan, pendidikan menempati posisi ketiga pada indikator tersebut. Posisi tersebut menunjukkan bahwa pendidikan merupakan hal yang krusial bagi keberlangsungan kehidupan di sebuah negara. Bila dilihat, pendidikan dan kemiskinan merupakan suatu hal yang saling mempengaruhi. Di

satu sisi, perubahan tingkat pendidikan berdampak besar pada perkembangan angka kemiskinan. Sedangkan di sisi lain, kemiskinan itu sendiri juga berdampak pada bagaimana pendidikan dikembangkan.

Dilihat dari fenomena yang ada di lingkungan sekitar masih banyak anak – anak yang belum bisa bersekolah. Padahal banyak sekolah negeri yang gratis dan dibiayai oleh negara akan tetapi tidak semata – mata hal tersebut dapat membuat seluruh anak di Indonesia dapat bersekolah karena pasti mereka membutuhkan yang namanya perlengkapan yang menunjang untuk pendidikannya. Sehingga dari fenomena ini dapat dilihat nantinya bahwa apakah program ini mampu atau tidak menjadi solusi bagi permasalahan yang berkaitan dengan kemiskinan dan pendidikan. Banyak juga fenomena yang beredar bahwa pemanfaatan dari program ini dan implementasinya yang mengalami kendala sehingga belum berjalan dengan baik. Sehingga, ini perlu dikaji karena mengingat pendidikan itu sangat penting. BPS dalam Siregar & Ritonga, (2019) pendidikan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Wawasan yang dimiliki oleh seseorang akan tumbuh sebagai hasil dari pendidikan, yang akan berguna untuk mempelajari keterampilan praktis di tempat kerja. Maka, investasi pendidikan dapat dianggap sebagai proyek pembangunan yang manfaatnya dapat dipetik di masa depan.

Hasil penelitian Muhammad Guntur, Arlina dan Umar Nain menunjukkan bahwa PKH belum berjalan efektif di Desa Lilirawang Kecamatan Bengo Kabupaten Bones, khususnya di bidang pendidikan. Pasalnya, dari empat indikator

keberhasilan implementasi kebijakan, hanya satu yang dalam kondisi baik. Faktor lain yang berkontribusi adalah bantuan yang diberikan tepat waktu dan sesuai aturan. Terlepas dari kenyataan bahwa belum ada pembaruan data dalam beberapa saat dan data yang digunakan sudah usang. Penelitian Chamid Sutikno dan Muhammad Yusuf yang dilakukan di Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas lebih tepatnya di Desa Kotayasa secara garis besar penelitian tersebut memperlihatkan bahwa Program Keluarga Harapan dilaksanakan sesuai dengan semua kebijakan dan peraturan yang berlaku, koordinasi dan komunikasi yang baik telah terjalin dengan berbagai aktor yang terlibat juga peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk meningkatkan taraf pendidikan merupakan salah satu faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan.

Menurut penelitian Ade Kurniawan, Lukmanul Hakim, dan Rachmat Ramdani, efektivitas dan kesesuaian implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan di Kabupaten Karawang dinilai berdasarkan beberapa indikator penilaian. Namun, beberapa indikator tersebut menjadi penghambat pelaksanaan Program Keluarga Harapan. Penelitian Herlina terhadap implementasi PKH di Kelurahan Sumber Sari secara garis besar ada beberapa masalah dan implementasi PKH yang tidak memadai. Dan penelitian Depi Zahrawati dan Henni Muchtar secara garis besar pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 menunjukkan beberapa penerima bantuan yang masih belum dapat berkomitmen pada tanggungjawab mereka dan dana bantuan yang semestinya digunakan untuk keperluan sekolah tetapi tidak dipakai

untuk membiayai kebutuhan sekolah serta masih ada sumber daya dan fasilitas Nagari Malampah yang menghambat dan mendukung pelaksanaan Program Keluarga Harapan.

Pada penelitian ini, bertujuan untuk mengetahui manfaat dan implementasi dari Program Keluarga Harapan yang telah ada sejak tahun 2007 sampai saat ini khususnya pada bidang pendidikan. Selain itu, tujuan dari penelitian ini juga untuk melihat apakah program ini sudah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Kebon Baru sesuai dengan ketentuan – ketentuan yang telah ditetapkan. Kemudian juga untuk melihat apa saja hambatan – hambatan yang ditemukan pada saat pelaksanaan dari Program Keluarga Harapan ini dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Kebon Baru, atau dengan adanya program bantuan sosial ini memberikan efek ketergantungan terhadap penerima manfaat. Penelitian ini berupaya untuk memecahkan persoalan yang tersebut.

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan maka, peneliti tertarik untuk meneliti tentang Program Keluarga Harapan, dengan judul penelitian yaitu “Implementasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Kebon Baru”. Pengambilan tema pada penelitian ini karena didasari bahwa ini masih ada kaitannya dengan PKn. PKn merupakan ilmu yang multidisipliner yaitu ilmu yang berkolaborasi dengan disiplin ilmu – ilmu sosial, humaniora, Pancasila, UUD 1945 dan dokumen negara lainnya (L Suradi, 2019). Selain itu, PKn juga mencakup tiga dimensi yaitu pertama, dimensi pengetahuan kewarganegaraan (*civics knowledge*), kedua dimensi

keterampilan kewarganegaraan (*civics skills*), ketiga dimensi nilai – nilai kewarganegaraan (*civics values*). Tema yang diambil termasuk ke dalam dimensi ketiga yaitu dimensi nilai – nilai kewarganegaraan (Kardiman, 2014).

B. Masalah Penelitian

Pembahasan tentang persoalan – persoalan terkait kesejahteraan masyarakat merupakan pembahasan yang sangat bermanfaat untuk dibicarakan, sebab selain untuk memelihara ketertiban dan wujudkan keadilan, negara memiliki fungsi penting lainnya yaitu mewujudkan kesejahteraan bagi warganya (Soetomo, 2018). Indikator kesejahteraan berdasarkan buku yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik terdiri atas delapan indikator salah satu diantaranya yang menempati posisi urutan ketiga yaitu pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan mempunyai posisi penting untuk melihat tercapainya kesejahteraan khususnya dalam bidang pendidikan. Sehingga, diharapkan melalui pendidikan yang baik, untuk kedepannya dapat membuat kehidupan warga negara menjadi lebih sejahtera dan memutus rantai kemiskinan antargenerasi.

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Fokus pada penelitian adalah agar pembahasan pada penelitian yang akan dilakukan tidak membahas hal lain yang seharusnya tidak dibahas dalam penelitian ini, sehingga fokus penelitian ini untuk mengetahui apakah program ini telah berjalan secara optimal serta melihat apakah setelah mendapatkan bantuan PKH para penerima bantuan menjadi lebih sejahtera atau malah membuat mereka

menjadi menggantungkan diri kepada program bantuan sosial yang telah mereka terima. Sedangkan, sub fokus pada penelitian ini untuk melihat manfaat dari program bantuan PKH khususnya di bidang pendidikan.

D. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, maka pertanyaan penelitian yang muncul sebagai berikut:

1. Bagaimana manfaat dari Program Keluarga Harapan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang pendidikan di Kelurahan Kebon Baru?
2. Bagaimana implementasi Program Keluarga Harapan di Kelurahan Kebon Baru?

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat nantinya. Adapun manfaat dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman, pengetahuan, dan juga sebagai data evaluasi serta informasi dan masukan yang berharga untuk pemerintah guna memajukan program ini dikemudian hari.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh Program Keluarga Harapan yang juga bermanfaat bagi para Keluarga Penerima Manfaat serta diharapkan dapat berdampak positif terhadap kemampuan program dalam meningkatkan kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat di Kelurahan Kebon Baru.

F. Kerangka Konseptual

Hubungan antara konsep atau teori yang didukung oleh penelitian dan digunakan sebagai pedoman saat menyusun penelitian sistematis dikenal sebagai kerangka konseptual. Para peneliti menggunakan kerangka konseptual sebagai panduan untuk menggambarkan secara metodis teori yang mereka gunakan untuk penelitian mereka. Kerangka konseptual pada penelitian ini yaitu konsep implementasi, konsep kesejahteraan masyarakat dan PKH. Dalam penelitian ini, teori yang digunakan yaitu teori kesejahteraan sosial menurut Brudeseth yang terdiri dari empat indikator antarlain kesejahteraan materi, kesejahteraan bermasyarakat, kesejahteraan emosi dan kesejahteraan keamanan.